

ANALISIS ALOKASI ANGGARAN PENDIDIKAN PADA APBD KABUPATEN DELI SERDANG

**(Studi Tentang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Penjelasan Pasal 49 Ayat (1)
Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional)**

· T E S I S

**Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Administrasi Publik (MAP)
Pada Program Pascasarjana Universitas Medan Area**



Oleh :

SOPIAN NAULI

NPM. 081801096

**MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
M E D A N**

2010

**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

HALAMAN PERSETUJUAN

Tesis ini telah disetujui untuk diperbanyak dan dipertahankan oleh :

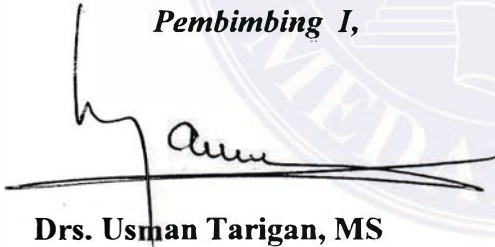
N a m a : Sopian Nauli

N I M : 081801096

PROGRAM : Magister Administrasi Publik

JUDUL : Analisis Alokasi Anggaran Pendidikan Pada APBD Kabupaten Deli Serdang (Studi Tentang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi At. Penjelasan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional) Analisis Kinerja Pendidikan Kabupaten Deli Serdang (Studi pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Deli Serdang)

Pembimbing I,



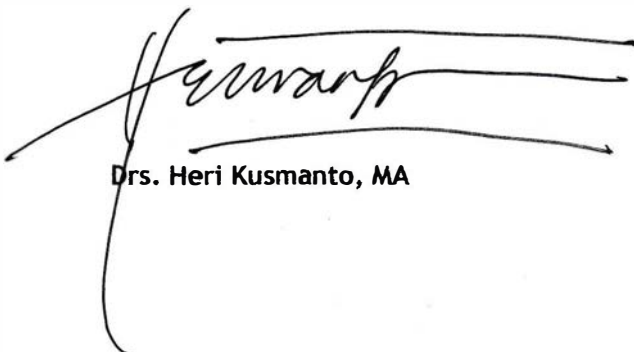
Drs. Usman Tarigan, MS

Pembimbing II,



Drs. Done Ali Usman, MAP

Direktur,



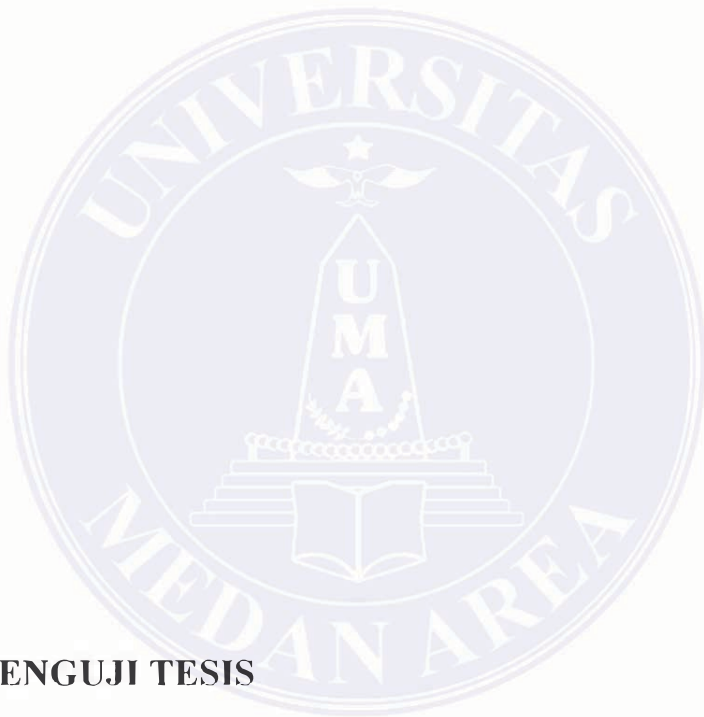
Drs. Heri Kusmanto, MA

Ketua Program Studi ,



Drs. Kariono, MA

TELAH DIUJI PADA TANGGAL 13 APRIL 2010



PANITIA PENGUJI TESIS

KETUA : DRS. KARIONO, MA

SEKERTARIS : WARJIO, SS, MA

PENGUJI I : DRS. USMAN TARIGAN, MS

PENGUJI II : DRS. DONE ALI USMAN, M.AP

PENGUJI TAMU : DRS. HERI KUSMANTO, MA

ABSTRAK

ANALISIS ALOKASI ANGGARAN PENDIDIKAN PADA APBD KABUPATEN DELI SERDANG (Studi Tentang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Penjelasan Pasal 49 Ayat (1)

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional)

N a m a : Sopian Nauli , NPM : 081801096

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dalam pasal 49 ayat (1) mempertegas ketentuan Undang-undang dasar tersebut : “Dan pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)”. Penjelasan pasal 49 ayat (1) diatas menyebutkan: “Pemenuhan pendanaan pendidikan dapat dilakukan secara bertahap”. Berdasarkan ketentuan konstitusional tersebut penelitian ini bermaksud melihat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) khususnya di Kabupaten Deli Serdang mengalokasikan dana pendidikan tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perhatian pemerintah Kabupaten Deli Serdang dalam alokasi anggaran khususnya sektor pendidikan dalam APBD untuk memenuhi hak konstitusional warga negaranya, dan mengetahui perkembangan porsi anggaran pendidikan dalam APBD pemerintah Kabupaten Deli Serdang dari tahun ke tahun pasca UU No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas dan Keputusan MK tentang penjelasan Pasal 49 ayat (1) UU No. 20 tentang Sisdiknas tahun 2003. Metode yang digunakan merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dimana data diperoleh dari key informan melalui wawancara dan juga data pendukung dari sumber sekunder yang ada pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Dengan format penelitian deskriptif kualitatif, maka analisis data dilakukan melalui interpretasi berdasarkan pemahaman intelektual yang dibangun oleh pengalaman empiris.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Perhatian pemerintah Kabupaten Deli Serdang dalam alokasi anggaran khususnya sektor pendidikan dalam APBD untuk memenuhi hak konstitusional warga negaranya adalah cukup tinggi dimana selama TA 2007-2010 rata-rata anggaran Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Deli Serdang adalah sebesar 40,88%. Perkembangan porsi anggaran pendidikan dalam APBD pemerintah Kabupaten Deli Serdang dari tahun 2007 sampai tahun 2010, rata-rata Persentase Anggaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Deli Serdang, untuk Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung selama Periode TA 2007 – 2010 sebagian besar (83,50%) digunakan untuk belanja tidak langsung yaitu belanja pegawai, sedang yang digunakan untuk belanja tidak langsung (belanja barang dan jasa serta belanja modal) hanya sebesar 13,50%. Kerancuan yang ada tentang fenomena dominansi belanja tidak langsung (belanja rutin) untuk bidang pendidikan yang tercermin dari pengalokasian gaji serta tunjangan pendidik secara perlahan hendaknya diseimbangkan dengan pengalokasian anggaran khusus bidang pendidikan pos belanja pembangunan untuk peningkatan mutu dan kualitas pendidikan di Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara agar generasi yang akan datang merupakan individu-individu yang dapat disejajarkan dengan kualitas daerah lain di wilayah nusantara bahkan di dunia bagi cakupan yang lebih luas.

Kata kunci : Kebijakan publik, APB, anggaran pendidikan.

ABSTRACT

ANALYSIS ON THE ALLOCATION OF EDUCATION BUDGET AT REGIONAL BUDGET OF DELI SERDANG REGENCY

**(A Study on Post Decision of Constitution Court Concerning With the
Description of Article 49 verse (1))**

Name : Sopian Nauli, Reg. No. 081801096

Act No. 20 of 2003 The Republic of Indonesia concerning with National Education System, as it is stated in article 49 verse (1) emphasizes that "The education fund besides the salary for the teachers and the cost for education affairs are minimally allocated for 20% from the regional budget. The explanation on the article 49 of verse (1) above states that "the fulfillment of the fund for the education system can be done periodically". Based on the constitutional clause, this research is carried out to see the Regional Budget, particularly Deli Serdang regency in the allocation of the education budget.

This research is aimed to know to what extent the attention of the regional government of Deli Serdang regency in the allocation of the budget, particularly for the education sector in Regional Budget in the case of fulfilling the constitutional rights of the citizens and to know the development of the portion of the education budget in regional budget of Deli Serdang regency from year to year after the issuance of Act No 20 of 2003 concerning with National Education System and post decision of Constitutional Court concerning with the description of Article 49 verse (1) Act No.20 concerning with National Education System 2003. It is descriptive method with qualitative approach. The primary data is taken from the key informant which is obtained through the interview and the supporting data from the secondary data in Deli Serdang regency. The format of this research is qualitative descriptive. The analysis data is conducted through the interpretation based on the intellectual understanding and it is built on the empirical understanding.

The results of the research show that the extent of the attention given by the government of Deli Serdang regency in the allocation of the budget, particularly for the education budget according to regional budget in the fulfillment of the constitutional rights of the citizen is categorized high, in which during in 2007-2010, the budget for the education, youth and sport is allocated for 40.88%. The progress of the portion for the educational budget in Regional Budget of Deli Serdang regency from 2007 up to 2010, the average of the percentage of the budget for Education, Youth and Sport in the form of direct or indirect expenditure is for 83.50%. it is for direct expenditure in the form of the expenditure of the employees, and in the form of indirect expenditure such as goods and service as well as capital expenditure only for 13.50%. The deviation regarding the indirect expenditure dominance phenomenon (routine expenditure) for the education sector as it is seen from the allocation of the salary and the allowance for the teachers should be gradually balanced with the allocation of special budget in education post and for other development in the attempt for increasing the quality of the education in Deli Serdang regency, North Sumatera province. It is expected that the young generation will have similar qualification with other provinces and even in the international level.

Key words : Public policy, Regional Budget, Education Budget.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis sebagai suatu syarat untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Publik pada Program Pascasarjana Universitas Medan Area.

Adapun judul Tesis ini adalah “ **Analisis Alokasi Anggaran Pendidikan Pada APBD Kabupaten Deli Serdang** (Studi Tentang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi A Penjelasan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional) Analisis Kinerja Pendidikan Kabupaten Deli Serdang (Studi pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Deli Serdang)”. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih dirasakan sekali banyak kekurangan dan kelemahan mengingat keterbatasan penulis. Dalam penyelesaian tesis ini, banyak pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof.Dr. H. M. Yacob Matondang MA, Rektor Universitas Medan Area
2. Bapak Drs. Heri Kumanto, MA, Direktur Program Pascasarjana UMA,
3. Bapak Drs. Kariono, MA, dan Drs. Warjio, MA, Ketua dan Sekretaris Program Studi MAP, yang telah banyak memberikan masukan dan saran-sarannya.
4. Bapak Drs. Usman Tarigan, Wakil Direktur II PPs UMA, sebagai Pembimbing I atas segala bimbingan dan pengarahannya kepada penulis.
5. Bapak Drs. Done Ali Usman, MAP, sebagai Pembimbing II atas segala bimbingan dan pengarahannya kepada penulis.
6. Bapak Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Deli Serdang beserta staf

7. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Pengajar PPs Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area yang telah memberi bekal ilmu serta kelancaran dalam proses penyusunan dan penyelesaian tesis ini.
8. Terima kasih buat istri dan anak-anak tercinta yang telah mensupport dan member semangat serta doa demi keberhasilan dan kesuksesan penulis .

Semoga amal sholeh mereka semua mendapat balasan yang berlipat ganda dari Tuhan Yang Maha Kuasa, Amin.

Medan,

Maret 2010

Penulis



SOPIAN NAULI

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
ABSTRAKSI	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vi
 BAB I : PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah.....	4
1.3. Tujuan Penelitian.....	4
1.4. Manfaat Hasil Penelitian.....	5
 BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Kebijakan Publik	5
2.1.1. Pengertian Kebijakan Publik	6
2.1.2. Proses Analisa Kebijakan Publik	11
2.1.3. Implementasi Kebijakan	18
2.1.4. Teori Implementasi Kebijakan	21
2.2. Sistem Pendidikan Nasional	30
2.2.1. Kebijakan Umum Pengembangan Pendidikan.....	31
2.2.2. Program Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Pendidikan Nasional	32
 BAB III : METODE PENELITIAN	
3.1. Jenis Penelitian	39
3.2. Populasi dan Sampel (Informan)	39
3.3. Teknik Pengumpulan Data.....	39
3.3.1. Wawancara	40
3.3.2. Penelitian Kepustakaan (<i>Library Research</i>)	40
3.4. Teknik Analisa Data.....	40

BAB IV : GAMBARAN UMUM KABUPATEN DELI SERDANG

4.1. Keadaan Geografi	42
4.2. Keadaan Demografi	47
4.3. Pemerintahan.....	51
4.4. Kebijakan Pemerintahan Daerah Deli Serdang di berbagai bidang.....	58
4.5. Strategi Pembangunan Daerah	61
4.5.1. Kondisi Lingkungan Internal Kabupaten Deli Serdang	61
4.6. Keuangan Daerah	65

BAB V : ANALISA DAN PEMBAHASAN

5.1. Perhatian Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Dalam Alokasi Anggaran Khususnya Sektor Dalam APBD	68
5.2. Perkembangan Porsi Anggaran Pendidikan Dalam APBD Pemerintah Kabupaten Deli Serdang	76

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan	81
6.2. Rekomendasi	82

DAFTAR PUSTAKA.....	83
----------------------------	-----------

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
4.1	Luas Wilayah, Jumlah Desa / Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Deli Serdang.....	45
4.2	Penggunaan Lahan di Kabupaten Deli Serdang.....	46
4.3	Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Deli Serdang.....	48
4.4	Luas Wilayah dan Rasio Terhadap Luas Kabupaten Deli Serdang Menurut Kecamatan.....	49
4.5	Nama Ibu Kota Kecamatan dan Jarak Ibu Kota Kecamatan ke Lubuk Pakam	50
4.6	Perkembangan APBD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2007 – 2010	66
5.1	Perkembangan Jumlah Anggaran Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Deli Serdang TA 2007 s/d 2010	70
5.2	Perkembangan Jumlah Anggaran Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Deli Serdang TA 2007 s/d 2010	71
5.3	Perkembangan Jumlah dan Persentase APBD Anggaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, dan Belanja Langsung Kabupaten Deli Serdang TA 2007 s/d 2010	71
5.4	Perkembangan Jumlah dan Persentase APBD Anggaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, dan Belanja Langsung Kabupaten Deli Serdang TA 2007 s/d 2010	75
5.5	Perkembangan Anggaran Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Deli Serdang 2007-2010	77
5.6	Persentase Perkembangan Anggaran Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Deli Serdang 2007-2010	79

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu tujuan Nasional bangsa Indonesia yang diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Orientasi pembangunan saat ini juga telah bergeser ke arah pembangunan yang berpusat pada pengembangan SDM sebagai tulang punggung kemajuan bangsa. Pendidikan merupakan usaha yang dilakukan secara sistematis agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran dan/atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap Negara berhak mendapat pendidikan, dan ayat (3) menegaskan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Untuk itu, seluruh komponen bangsa wajib mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu tujuan negara Indonesia.

Reformasi sejak 1998 yang lalu secara umum menyuarakan diterapkannya prinsip demokrasi, desentralisasi, keadilan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam hubungannya dengan pendidikan, prinsip-prinsip tersebut akan memberikan dampak yang mendasar pada kandungan, proses, dan manajemen sistem pendidikan. Selain itu, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat dan memunculkan tuntutan baru

dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam sistem pendidikan. Tuntutan tersebut menyangkut pembaharuan sistem pendidikan, diantaranya pembaharuan kurikulum, yaitu diversifikasi jenis pendidikan yang dilakukan secara profesional, penyusunan standar kompetensi tamatan yang berlaku secara nasional dan daerah menyesuaikan dengan kondisi setempat; penyusunan standar kualifikasi pendidik yang sesuai dengan tuntutan pelaksanaan tugas secara profesional; penyusunan standar pendanaan pendidikan untuk setiap satuan pendidikan sesuai prinsip-prinsip pemerataan dan keadilan; pelaksanaan manajemen pendidikan dengan sistem terbuka dan multimakna. Pembaharuan sistem juga meliputi penghapusan diskriminasi antara pendidikan yang dikelola pemerintah dan pendidikan yang dikelola masyarakat, serta pembedaan antara pendidikan keagamaan dan pendidikan umum.

Pembaharuan sistem pendidikan nasional dilakukan untuk memperbaharui visi, misi, dan strategi pembangunan pendidikan nasional. Pendidikan nasional mempunyai visi terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga Negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas. sehingga mampu dan paraktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.

Pembaharuan sistem pendidikan nasional perlu disesuaikan dengan pelaksanaan otonomi daerah yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

DAFTAR PUSTAKA

- Batubara, Muhyi. 2004. *Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: Ciputat Press.
- BPPN dan Bank Dunia, 1999. *School Based Management di Tingkat Pendidikan Dasar*. Jakarta: BPPN dan Bank Dunia.
- Budiyanto, Nur. 2001. Profil Pegawai Negeri Sipil (PNS) Menuju Indonesia Baru Dalam Jurnal *Studi Indonesia: Kajian Sosial-Humaniora*. Vol.11.No1. Maret, 2001. Lembaga Penelitian Universitas Terbuka. Jakarta.
- Depdiknas, 2003. *Standar Kompetensi Guru (SKG)*. Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Tenaga Kependidikan.
- Depdikbud, 2003, *Undang undang Republik Indonesia No 20 tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Jakarta : CV Eko Jaya,
- Dun, William N, 1999, *Pengantar Analisis Kebijakan*, Gajah Mada University Press, Jogjakarta.
- Eriza, Faisal, 2003, *Evaluasi Pelaksanaan Program Peningkatan Pendidikan Dasar/ Basic Education Project di Kabupaten Langkat*, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Fathurrohman, Pupuh & Sobry Sutikno. 2007. *Strategi Belajar Mengajar*. Bandung: Refika Aditama.
- Hamid K, Abdul dan Yusri. 2005. "Pengembangan Model Pengajaran Berdasarkan Kompetensi Untuk Meningkatkan Kualitas SDM Bidang Keterampilan Sesuai dengan Kebutuhan Lapangan Kerja" Dalam *Jurnal Penelitian Bidang Pendidikan*. Terakreditasi Nasional Medan: Volume 12 Edisi Khusus Nopember 2005 hh. 1 - 12.
- Moedjiarto. 2002. *Sekolah Unggul*. Jakarta: Duta Graha Pustaka.
- Mulyasa, E., 2003. *Kurikulum Berbasis Kompetensi: Konsep, Karakteristik, dan Implementasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa, E. 2007. *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan: Suatu Panduan Praktis*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muslich, Masnur. 2007. *KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan): Dasar Pemahaman dan Pengembangan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rosyada, Dede. 2004. *Paradigma Pendidikan Demokratis: Sebuah Model Pelibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan*. Jakarta: Prenada Media.